
PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PEMBENTUKAN PREFERENSI POLITIK AWAL PEMILIH PEMULA

Muhamad Tarom
Universitas Sebelas April

Article Info

Article history:

Received Des 23, 2023

Revised Des 25, 2023

Accepted Des 27, 2023

Keywords:

Novice Voter

Civic Education

Participation political
preference

Democratic System

ABSTRACT

Political preferences are an important aspect for someone to be able to participate well in a democratic system. Based on certain political preferences, a person will have reasons and foundations for their political behavior and choices, including first-time voters. Therefore, understanding aspects of its formation is important to understand their initial understanding before being directly involved in political spaces such as elections. This paper aims to show the important role of citizenship education in influencing the formation of initial political preferences of novice voters. Based on qualitative research conducted in Sumedang City in 2020 on first-time voters who were high school students, it was found that the formation of their initial political preferences was not only influenced by parental preferences as previously believed. They get information regarding their initial views on politics through civics education materials. Information from television and social media related to standards and values in behaving as citizens among other citizens has given them an initial understanding of the importance of participating well in the context of life, including at the start of general elections. This makes citizenship education a space for socialization as well as political education for novice voters. This understanding then becomes one of the basics for developing their understanding of politics and how they should behave as good citizens in a democratic system.



Copyright © 2023 JRPA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Muhamad Tarom

Program Studi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sebelas April

Jl. Angkrek Situ No. 19 Sumedang

Email: m_tarom@unsap.ac.id

1. INTRODUCTION

Demokrasi sebagai sistem negara Indonesia yang memiliki makna pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Oleh karenanya partisipasi rakyat menjadi suatu pondasi penting dari penerapan sistem demokrasi negara Indonesia. Dengan demikian setiap elemen masyarakat yang sudah memiliki hak pilih dalam pemilu untuk turut berpartisipasi di dalamnya. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, masyarakat di Indonesia senantiasa diharapkan untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang politik sebagai wujud dari konsepsi tentang *Demos* dan *Kratos* (Pemerintahan oleh Rakyat). Dengan demikian, baik secara individu ataupun bagian dari kelompok masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam ruang pemilu menjadi aspek penting demokrasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Pemilih pemula sebagai salah satu segmen dalam masyarakat, hal ini bermakna peran pentingnya partisipasi masyarakat. Hal ini berarti bahwa partisipasi pemilih pemula merupakan segmen masyarakat pemilih yang penting dalam menjamin pelaksanaan sistem demokrasi yang lebih substansial. Hal tersebut mampu mewujudkan konstitusi Republik Indonesia yang mengamanatkan tentang pentingnya kedaulatan rakyat untuk dilaksanakan dengan baik menuju cita-cita bangsa yang adil, makmur dan sejahtera. Dalam hal ini kedaulatan rakyat melingkupi seluruh rakyat Indonesia, di mana segmen pemilih pemula juga menjadi bagian di dalamnya. Oleh karena itu setiap ruang politik yang memungkinkan adanya partisipasi rakyat.

Lebih dari itu, hal tersebut juga sekaligus sebagai upaya untuk menjamin adanya legitimasi yang kuat atas sistem politik yang berlaku termasuk setiap kegiatan yang terkait dengannya, seperti pemilu. Pemilu merupakan salah satu kegiatan penting dalam sistem demokrasi, maka pemilu sudah semestinya menjadi ruang keterlibatan setiap segmen dalam masyarakat yang dimungkinkan oleh hukum tanpa kecuali termasuk segmen pemilih pemula. Dalam pemahaman ini pemilih pemula merupakan segmen masyarakat yang sama dengan segmen masyarakat lain misalnya para orang tua. Secara konstitusional, tidak ada perbedaan atas hak dalam pemilu bagi pemilih pemula yang umumnya merupakan kalangan muda dengan golongan orang dewasa atau tua. Semuanya memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam ruang politik. Dengan demikian dapat diasumsikan pemilih pemula sebagai segmen yang telah memiliki kemampuan dan pemahaman yang sama dengan kalangan dewasa dalam partisipasi pemilu. Namun masih menjadi permasalahan tersendiri bagi pemilih pemula. Berdasarkan *terminology* yang ada, pemilih pemula merupakan segmen masyarakat yang pada dasarnya dianggap belum memiliki pengalaman yang baik dalam pemilu lain seperti halnya segmen dewasa. Hal ini erat kaitannya dengan kata "pemula" yang dilekatkan pada kelompok masyarakat muda. Pada dasarnya ada beberapa makna yang terkait dengan kata tersebut, namun secara umum tulisan ini menggunakan pemahaman yang diartikan sebagai "pertama kali memiliki hak memilih karena telah mencukupi usia sesuai ketentuan". Oleh karenanya Analisa terhadap segmen ini menjadi penting karena secara formal mereka telah dianggap memiliki hak yang sama dengan kalangan dewasa, namun pada konteks pengetahuan, mereka cenderung belum memiliki pengalaman empirik dan terlibat secara langsung di dalamnya.

Sebagai bagian dari masyarakat yang baru akan menggunakan hak pilihnya, pemilih pemula seringkali dipandang sebagai segmen masyarakat yang secara politik rentan terhadap berbagai pengaruh yang akan mengganggu kemandirian mereka dalam menentukan perilaku politiknya termasuk dalam memilih dalam pemilu. Kondisi tersebut menjadikan mereka masih dianggap sebagai segmen pemilih yang masih labil dalam menentukan pilihan dalam pemilu. Hal tersebut terutama dikaitkan dengan kenyataan bahwa mereka baru pertama kali memenuhi syarat formal sebagai pemilih sehingga belum mempunyai preferensi yang cukup untuk bertindak sebagai pemilih yang mandiri dalam pemilihan umum. Hal ini bisa saja menjadi segmen komunitas dalam masyarakat yang terputus dari politik. Dalam penelitian dan literatur sebelumnya terhadap segmen ini menunjukkan bahwa para pemilih pemula merupakan kaum muda yang cenderung kurang berminat pada politik karenanya mereka dianggap kurang siap untuk berpartisipasi secara langsung dalam lapangan politik termasuk dalam pemilu seperti segmen pemilih dewasa. Selain itu, pemilih pemula juga sering diasumsikan sebagai segmen pemilih yang membutuhkan strategi pendekatan khusus dalam memahami kecenderungan perilaku politiknya. Hal ini terkait dengan asumsi bahwa mereka belum memiliki pengetahuan yang cukup baik dalam membentuk perilaku politiknya sehingga perilaku politiknya akan cenderung mudah berubah.

Pemahaman tersebut menjadikan pemilih pemula cenderung dianggap hanya mengikuti pengetahuan dan preferensi politik orang-orang terdekatnya, dalam hal ini orang tuanya. Sehingga pemilih pemula dianggap sebagai kelompok pemilih yang mudah ditebak arah perilaku politiknya dan pilihan dalam pemilunya. Hal tersebut menjadikan orang tua menjadi faktor paling dominan dalam mempengaruhi preferensi politik pemilih pemula. Sehingga hal ini menjadikan segmen yang seolah sulit di ubah dalam masyarakat karena perilaku politik pemilih pemula sangat ditentukan oleh peran orang tua sehingga preferensi pemilih pemula kurang mandiri.

Namun, hal tersebut nampaknya mengalami perubahan. Terdapat kecenderungan bahwa para orang tua dinilai mulai kehilangan posisinya sebagai sumber informasi utama dalam pembentukan preferensi politik pemilih pemula. Jika sebelumnya, posisi orang tua seolah menunjukkan bahwa satu-satunya sumber referensi politik bagi pemilih pemula. Hal tersebut nampaknya telah mengabaikan pentingnya aktivitas belajar mengajar di sekolah sebagai potensi sumber referensi yang baik bagi pemilih pemula. Padahal salah satu sumber referensi politik yang sangat potensial untuk dapat membantu pemilih pemula dalam membentuk preferensi awal politiknya adalah pendidikan kewarganegaraan.

Selama ini terdapat kecenderungan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang diterima di sekolah oleh para pemilih pemula terutama mereka yang berada pada tingkat sekolah menengah atas, cenderung hanya dilihat sebagai suatu mata pelajaran yang wajib diikuti seperti mata pelajaran yang lain. Aspek formal pendidikan kewarganegaraan seperti kehadiran serta kemampuan menjawab tugas yang diberikan oleh pengajar di sekolah lebih cenderung memiliki pengaruh kuat dalam keberadaan belajar mengajar pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Hal ini berdampak, peran pendidikan kewarganegaraan seperti tidak memberikan sumbangan yang cukup signifikan sebagai sebuah proses pendidikan politik pada upaya pembentukan preferensi politik awal para pemilih pemula

Berdasarkan proses penelitian yang dilakukan di Kota Sumedang pada tahun 2020 terhadap segmen pemilih pemula, terdapat kecenderungan bahwa peran pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu sumber referensi penting dalam pembentukan preferensi awal politik pemilih pemula. Hal ini sekaligus juga menunjukkan bahwa preferensi politik pemilih pemula tidak selalu merupakan refleksi dari kecenderungan perilaku politik orang tuanya, melainkan juga merupakan hasil dari pengembangan pemahaman mereka yang bersumber dari informasi yang mereka terima melalui proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang mereka dapatkan di sekolah.

2. METHOD

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan pada tahun 2023. Penelitian ini dilakukan dengan proses wawancara mendalam kepada 45 informan. Para informan merupakan pelajar pada sekolah menengah atas atau yang sederajat di Kota Sumedang dan sekitarnya. Semua informan merupakan segmen pemilih pemula yang baru pertama kali akan memiliki hak pilih pada kegiatan Pilkada pada tahun 2023 di Kota Sumedang. Asal sekolah dari setiap informan dipilih berdasarkan beberapa kategori yakni Sekolah Swasta, Sekolah Negeri, Sekolah Berdasarkan Identitas Agama, dengan mencermati status sekolah unggulan dan non-unggulan. Kategorisasi ini dimaksudkan untuk mencoba menunjukkan kecenderungan pemilihan siswa-siswa berdasarkan latar belakang sekolah dari setiap informan. Seluruh informan yang dipilih, ditetapkan berdasarkan standar kriteria bahwa mereka terlibat aktif dalam organisasi di sekolah. Hal ini dimaksudkan untuk lebih menggali data lebih dalam karena mereka dianggap cukup memiliki pengalaman di organisasi sekolah sehingga mereka cukup dapat mengungkapkan pandangan dan mengekspresikan sikap dan pemikirannya terkait dengan kecenderungan preferensi politiknya.

3. RESULTS AND DISCUSSION

Dalam membangun partisipasi politik yang lebih baik menjadi salah satu isu penting dalam upaya mewujudkan sistem demokrasi di berbagai negara termasuk di Indonesia. Oleh karena itu setiap unsur dalam masyarakat diharapkan memiliki ruang sehingga dapat terlibat secara aktif dalam berbagai proses yang ada termasuk dalam proses pemilu, termasuk para pemilih pemula. Hal ini tentu saja membutuhkan kemampuan dan pemahaman yang baik dari setiap segmen masyarakat yang ingin terlibat terkait dengan substansi, dinamika dan efek dari setiap kondisi dalam ruang politik. Oleh karena itu, setiap orang yang terlibat diharapkan telah memiliki pemahaman atau preferensi yang memadai dalam menopang keterlibatannya. Kenyataan bahwa preferensi menjadi dasar bagi perilaku politik yang ditunjukkan dalam ruang-ruang politik, maka preferensi tentu menjadi aspek penting terkait dengan segmen pemilih pemula yang dianggap masih minim dalam berinteraksi dengan dinamika politik.

Sebagai segmen yang cenderung dianggap belum memiliki referensi politik yang memadai dan bahkan dianggap kurang tertarik dengan politik, pemilih pemula seringkali dianggap kurang siap terutama dalam partisipasinya dalam kegiatan politik seperti pemilu yang ada pada segmen pemilih dewasa. Hal ini terutama dikaitkan dengan anggapan masih minimnya sumber referensi politik yang dapat diakses oleh pemilih pemula dalam mempersiapkan diri menuju proses pemilu yang pertama kali akan mereka ikuti. Karena itu mereka dianggap perlu untuk mendapatkan proses pendidikan politik yang baik apalagi segmen memiliki jumlah yang biasanya cukup besar dalam suatu masyarakat.

Di Indonesia, pada tahun 2020 terdapat sekitar 5 juta pemilih pemula. Jumlah tersebut tentu merupakan jumlah yang signifikan. Di Kota Sumedang sendiri, pada pemilihan Bupati 2020, terdapat sekitar 12 ribu pemilih pemula yang berarti sekitar hampir 5% dari seluruh pemilih yang tercatat. Dengan demikian, pembentukan preferensi segmen ini dapat melalui pendidikan kewarganegaraan dilihat sebagai salah satu aspek yang penting dalam upaya awal pembentukan preferensi politik. Inipun sebagai sosialisasi kesadaran awal politik bagi sejumlah besar masyarakat yang disebut pemilih pemula. Secara mendasar pendidikan kewarganegaraan memiliki muatan yang menempatkan adanya interaksi antar warga negara baik sebagai individu maupun masyarakat serta adanya standar-standar perilaku tertentu berdasarkan norma dan nilai yang berlaku. yang inipun dikuatkan dalam materi- materi yang ada pada pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu struktur informasi yang dapat membentuk pandangan pemilih pemula terhadap dunia politik di sekitarnya. Melalui hal tersebut pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi dasar pemilih pemula memiliki muatan penting yang dapat membantu pembentukan preferensi pemilih pemula pada fase-fase awal pembentukan kesadaran politiknya. Oleh karena itu, pemilih pemula yang merupakan segmen pemuda dan sebagian besar adalah siswa level Sekolah Menengah Atas yang menerima pendidikan kewarganegaraan di sekolahnya yang memiliki sumber informasi awal yang penting terkait dengan pembentukan preferensi politiknya.

Berdasarkan bekal pendidikan kewarganegaraan itulah para pemilih pemula nantinya akan menunjukkan perilaku politiknya, termasuk pada saat memilih dalam pemilu. Hal tersebut menjadi suatu kecenderungan yang ditemukan dalam penelitian yang dilakukan terhadap segmen pemilih pemula di Kota Sumedang. Hal ini nampaknya menjadi dasar atas pandangan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan juga suatu pengetahuan yang berimplikasi pada perilaku tertentu. Hal tersebut diyakini oleh para pemilih pemula sebagai jalan bagi proses pembentukan bentuk preferensi politiknya. Hal ini dikonfirmasi oleh pemilih pemula yang menyatakan bahwa *“Awal bersekolah sudah mengenal pelajaran PKn sehingga dengan pelajaran PKn tersebut kami tidak asing dengan kata politik dari lingkungan sekolah, terkadang terkait dengan materi pelajaran tentang kewarganegaraan seperti pemilu dan lainnya guru dari mata pelajaran tersebut menjelaskan mengenai politik sebagai penunjang wawasan kewarganegaraan”*.

Dalam hal ini pemilih pemula yang telah memiliki wawasan pendidikan kewarganegaraan dapat meningkatkan pengetahuan atas politiknya terkait dengan interaksi kepentingan, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan fokus utama pendidikan kewarganegaraan menekankan pada kesadaran sebagai warga negaradan implikasinya dalam kehidupan bersama maka pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya dapat dipahami sebagai suatu proses pembelajaran politik awal pada level pemula. Dengan demikian, pada dasarnya pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu ruang persentuhan awal pemilih pemula dengan informasi terkait politik pada konteks dasar. Untuk menjadikan suatu pola perilaku sosial, pendidikan kewarganegaraan harus mampu untuk menghasilkan kemampuan empati, kooperatif, loyalitas, solidaritas dan toleransi. Semuanya merupakan sikap dasar yang penting bagi setiap warga negara dalam interaksinya dengan lingkungan sekitarnya juga dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bidang politik.\

Ini memungkinkan akan membuka paling tidak kesadaran para pemilih pemula tentang beberapa aspek dari sistem politik dalam konteks kehidupan mereka. Hal ini kemudian menjadi jalan dalam menambah pengetahuan politik pemilih pemula serta implikasinya kedepan dalam upaya menunjukkan partisipasinya secara baik dalam sistem pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat mengaitkan aspek literasi dan partisipasi politik secara lebih baik. Asumsi inipun terkait dengan kenyataan yang ditemukan dalam penelitian yang dilakukan, bahwa tingkat pengetahuan pada segmen pemilih pemula dapat mendorong minat yang besar dalam kapasitas awal pemilu. Sehingga pemilih pemula dapat lebih baik dalam menentukan pilihannya saat pemilu dilaksanakan.

Hal tersebut pada dasarnya menunjukkan konfirmasi empirik bahwa posisi pendidikan kewarganegaraan telah mengalami perubahan yang cukup mendasar dari sekedar sebagai suatu bidang studi yang akan dihafalkan atauhanya dilihat sebagai gambaran contoh-contoh perilaku tertentu. Namun pendidikan kewarganegaraan telah menunjukkan adanya pengaruh signifikan kepada para pemilih pemula dalam membentuk kesadaran politik awal yang pada akhirnya membentuk preferensi politik para pemilih pemula. Hal ini dinyatakan oleh pemilih pemula yang menyatakan bahwa *“di sekolah terdapat pelajaran PKN yang beberapa materinya membahas mengenai politiksehingga dengan mempelajarinya atau mendengar penjelasan dari guru mata pelajaran tersebut saya menjadi lebih tahu tentang politik di Indonesia.”*

Kenyataan tersebut menjadikan pendidikan kewarganegaraan memiliki misi lebih besar dari hanya sekedar sumber informasi tentang dinamika kehidupan bernegara juga dapat menambah wawasan pendidikan politik yang lebih komprehensif sejak awal bagi para generasi muda. Tentu saja, seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa pendidikan kewarganegaraan bukanlah satu-satunya sumber referensi, karena peran orang tua termasuk perkembangan media sosial menjadi sumber-sumber informasi pembentukan preferensi politik awal pemilih pemula.

Dalam hal ini, pendidikan kewarganegaraan memberikan kesadaran awal terkait dengan bagaimana posisi mereka dalam ruang politik sehingga memiliki dasar berpikir tentang bagaimana memosisikan diri dalam ruang tersebut. Pernyataan dari pemilih pemula bahwa *"Agar dapat dianggap sebagai warga negara yang baik di tengah masyarakat dan tidak menimbulkan masalah, PKN memberikan contoh-contoh perilaku yang harus dilakukan sebagai warga negara secara tepat dalam bermasyarakat"*. Melalui pendidikan kewarganegaraan pemilih pemula yang telah memiliki pemahaman dasar preferensi politik awal akan bermanfaat dalam upaya mereka mengembangkan pengamatannya pada realitas politik di sekitarnya. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya berhenti pada aspek pemahaman, namun bagi pemilih pemula di Kota Sumedang, telah mengarah kepada upaya untuk memastikan kesadaran politik pemilih pemula tentang bagaimana mereka sebaiknya berperilaku secara tepat. Hal ini menjadi tujuan akhir dari pendidikan kewarganegaraan dalam mendorong peletakan pemahaman yang mengarah kepada kemampuan dan keinginan untuk berpartisipasi dalam ruang politik.

Pada dasarnya Pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu aspek yang membantu pemilih pemula dalam memasuki ruang politik dan berkontribusi secara lebih baik. Pendidikan kewarganegaraanpun memainkan perannya sebagai penyedia informasi dalam membuat penilaian dengan lebih baik. Dengan posisi yang sangat penting baik dalam konteks kuantitas maupun sebagai calon penerus bangsa, kemampuan pemilih pemula untuk mengidentifikasi dirinya sejak awal dalam konteks politik seperti yang didapatkan melalui pendidikan kewarganegaraan menjadi faktor yang akan berpengaruh pada keberlanjutan sistem demokrasi yang ada. Berdasarkan hal tersebut maka pembentukan preferensi politik sebagai bentuk awal kesadaran politik pemilih pemula pada dasarnya terbentuk dari berbagai faktor yang akan saling memperkuat bukan hanya orang tua, media, sosial, pergaulan antar teman sebaya, namun juga dengan keberadaan pendidikan kewarganegaraan yang diterima dari kegiatan sekolah. Jika hal ini terbentuk dengan baik, maka pada dasarnya generasi muda dalam hal ini para pemilih pemula akan menjadi unsur penting dalam mempertahankan sistem demokrasi yang senantiasa membutuhkan peran aktif masyarakat secara substansial dalam memastikan keberlangsungan sistem ini dalam menuju terbentuknya kebaikan bersama yang menjadi dasar eksistensi dalam demokrasi.

Upaya untuk membangun partisipasi politik yang lebih baik menjadi salah satu tantangan dalam upaya mewujudkan sistem demokrasi di berbagai negara termasuk di Indonesia. Oleh karena itu setiap unsur dalam masyarakat diharapkan memiliki ruang dan mampu terlibat secara aktif dalam berbagai proses yang ada termasuk dalam proses pemilu, termasuk para pemilih pemula. Hal ini tentu saja membutuhkan kemampuan dan pemahaman yang baik dari setiap segmen masyarakat yang ingin terlibat terkait dengan substansi, dinamika dan efek dari setiap kondisi dalam ruang politik. Kenyataan bahwa preferensi menjadi dasar bagi perilaku politik yang ditunjukkan dalam ruang-ruang politik, maka preferensi tentu menjadi aspek penting terkait dengan segmen pemilih pemula yang dianggap masih minim dalam berinteraksi dengan dinamika politik.

Pemilih pemula seringkali dianggap kurang siap terutama dalam partisipasi pertamanya dalam kegiatan politik seperti pemilu dibandingkan dengan segmen pemilih dewasa. karena belum memiliki referensi politik yang memadai dan bahkan dianggap kurang tertarik dengan politik, karena itu mereka dianggap perlu untuk mendapatkan proses pendidikan politik yang baik apalagi segmen pemilih pemula ini memiliki jumlah yang biasanya cukup besar dalam suatu masyarakat.

4. CONCLUSION

Pendidikan kewarganegaraan yang didukung dengan partisipasi masyarakat yang baik merupakan salah satu kunci bagi bekerjanya sistem demokrasi yang lebih baik di Indonesia. Dengan demikian, masyarakat dituntut untuk dapat berpartisipasi dengan baik dalam berbagai ruang demokrasi termasuk pemilu. sebagai ruang untuk memilih para pemimpin, maka pemilu tentu membutuhkan kemampuan dari setiap segmen masyarakat yang berpartisipasi didalamnya untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai sehingga mampu berpartisipasi secara rasional. Hal ini termasuk pada segmen pemilih pemula.

Sebagai segmen masyarakat yang baru pertama kali memiliki hak dalam memilih, pemilih pemula seringkali dianggap belum memiliki pengetahuan yang memadai untuk berpartisipasi dengan baik. Jika pun mereka berpartisipasi maka sangat dikaitkan dengan kecenderungan perilaku politik orang tuanya, dimana orang tua dianggap sebagai sumber pembentuk utama pada awal pembentukan preferensi politik mereka. Namun hasil penelitian dari segmen pemula di Kota Sumedang menunjukkan kecenderungan telah adanya preferensi yang cukup dari pemilih pemula terhadap politik. Salah satu sumber utama pembentukan preferensi tersebut adalah melalui pendidikan kewarganegaraan.

Melalui pendidikan kewarganegaraan, peran serta keluarga dan masyarakat para pemilih pemula mendapat sumber informasi terkait bagaimana individu sebagai bagian dari masyarakat dapat menemukan pola perilaku yang diharapkan dalam dinamika kehidupan politik. Hal tersebut menjadi awal kesadaran yang

membentuk preferensi politiknya. Bagi mereka, pendidikan kewarganegaraan telah menjadi suatu ruang pendidikan politik yang memungkinkan mereka mengenal aspek-aspek hak dan kewajiban warga negara yang lebih baik lagi kedepannya dalam kerangka interaksi antar warga negara. Hal ini menjadi awal preferensi mereka dan menjadi dasar pengembangan pengetahuan mereka. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan telah menumbuhkan kesadaran politik awal yang pada akhirnya memberi referensi awal pada pilihan perilaku politik mereka dalam sistem demokrasi yang ada. Pendidikan kewarganegaraan tampaknya telah memberikan efek positif yang baik pada level pemilih pemula dalam interaksi awalnya dengan pemahaman politik. Hal tersebut pada akhirnya menunjukkan besarnya peran pendidikan kewarganegaraan dalam pembentukan preferensi politik pemilih pemula pada awal pembentukan preferensi politiknya. Pada pemahaman ini, pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu peluang besar bagi upaya mengembangkan kepedulian yang mengarah kepada partisipasi aktif pemilih pemula secara tepat sebagai warga negarayang baik.

REFERENCES

- Andayani, Dwi. "Ada 5 Juta Pemilih Pemula di Pemilu 2019" dalam <https://news.detik.com/berita/d-4215354/ada-5-juta-pemilih-pemula-di-pemilu-2019> diakses 24 Desember 2020.
- Ardiansyah. "Pemilih Pemula Pilwalkot Makassar capai 42.460 Orang" dalam <http://politik.djournalist.com/2020/11/16/pemilih-pemula-pilwalkot-makassar-capai-42-460-orang/> diakses 24 Desember 2020
- Biegelbauer, Peter & Janus Hansen. "Democratic Theory and Citizen Participation: Democracy Models in the Evaluation of Public Participation in Science and Technology" dalam *Science and Public Policy*, Vol. 38, No. 8 (2011), h. 589-597.
- Ekstrom, Mats & Johan Ostman. "Family Talk, Peer Talk, and Young People's Civic Orientation" dalam *European Journal of Communication*, Vol. 28, No. 3 (2013), h. 294-308.
- Gherghina, Sergiu & Brigitte Geissel. "Linking Democratic Preferences and Political Participation: Evidence from Germany" dalam *Political Studies*, Vol. 65, No. 1 (2017), h. 24-42.
- Gidengil, Elisabeth, Hanna Wass & Maria Valaste. "Political Socialization and Voting: The Parent-Child Link in Turnout" dalam *Political Research Quarterly*, Vol. 69, No. 1 (2016), h. 373-383.
- Kristenseng, Niels Nørgaard & Trond Solhaug. "Students as First-time Voters: The Role of Voter Advice Applications in Self-reflection on Party Choice and Political Identity" dalam *Journal of Social Science Education*, Vol. 15, No. 3 (2016), h. 32-42.
- Laughland-Booÿ, Jacqueline, Zlatko Skrbiš & Zareh Ghazarian. "The Voting Strategies of Young People: a Conceptual framework" dalam *Australian Journal of Political Science*, Vol. 53, No. 2 (2018), h. 143-159.
- Manning, Nathan & Kathy Edwards. "Does Civic Education for Young People Increase Political Participation? A Systematic Review" dalam *Educational Review*, Vol. 66, No. 1 (2014), h. 22-45 .
- Ohme, Jakob. "When Digital Natives Enter the Electorate: Political social Media Use among First-Time Voters and its Effect on Campaign Participation" dalam *Journal of Information Technology and Politics*, Vol. 16, No. 2 (2019), h. 119-136.
- Sofyan, Fitri Silvia & Dadang Sundawa. "Hubungan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan Peningkatan Wawaasan Kebangsaan dan Semangat Nasionalisme Mahasiswa" dalam *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 24, No. 2 (2015), h. 185
- Sukri, A. Yunus & D. Ekawaty. "The Forming of First-time Voters' Political Preference in Indonesia" dalam *Youth Voice Journal* (2021), h. 1-18.
- Wardhani, Primandha Sukma Nur. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum" dalam *JUPIIS Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, Vol. 10, No. 1 (2018), h. 57-62.
- Yoldaş, Özlem Becerik. "Civic Education and Learning Democracy: Their Importance for Political Participation of Young People" dalam *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Vol. 174 (2015), h. 544 – 549.
- Yustiningrum, RR Emilia & Wawan Ichwanuddin. "Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih pada Pemilu 2014" dalam *Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia*, Vol. 12, No. 1 (2015), h. 117-1335.